

Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan Dilantik Presiden di Istana Negara

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 orang anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) Republik Indonesia untuk masa jabatan Tahun 2019-2023, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

Pelantikan anggota Komjak ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 M Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Komjak Republik Indonesia.

"Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung

jawab," demikian kutipan pengambilan sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi yang diikuti anggota Komjak di Istana Negara, Rabu (21/2).

Berikut 9 anggota Komjak RI Masa Jabatan 2024-2028 yang baru dilantik adalah: Pujiono Suwandi (Ketua), Babul Khoir (Wakil Ketua), Muhammad Yusuf, Hefnir, Nurwinah, Dahlena, Rita Serena Kalibonso, Diah Srikandi, dan Nurokhman

Hadir dalam pelantikan tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menhan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menpan RB Abdullah Azwar Anas serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. ● han

Sidang Praperadilan, Aiman Berjuang Untuk Kerahasiaan Narasumbernya

JAKARTA (IM) - Tim hukum Aiman Witjaksono membacakan replik untuk menanggapi jawaban dari Bidkum Polda Metro Jaya, pada persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (21/2).

Aiman menegaskan bahwa dirinya tetap akan memperjuangkan kerahasiaan narasumbernya.

"Intinya bahwa saya tetap akan berjuang narasumber saya agar tidak dibuka, untuk apa? Untuk demokrasi," ujar Aiman, di PN Jakarta Selatan, Rabu (21/2).

Sebagai wartawan yang bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan narasumbernya, selain berjuang melalui sidang praperadilan, Aiman pun mendatangi Komnas HAM. Hal itu juga dilakukan Aiman untuk menjaga demokrasi yang ada di Indonesia ini.

"Kita tak hanya berjuang di pengadilan ini, tapi kita juga telah menyampaikan

seluruh permasalahan-permasalahan ini ke Komnas HAM, dan Komnas HAM menanggapi positif apa yang saya sampaikan karena ini untuk menegakkan demokrasi," tuturnya.

"Ini untuk melindungi narasumber yang kemudian untuk memelihara kondisi negeri kita agar demokrasi tetap tumbuh dan berkembang, bukan sebaliknya runtuh," kata Aiman.

Aiman menegaskan bakal mengikuti semua proses persidangan praperadilannya itu di PN Jakarta Selatan, hingga pada agenda putusan nanti.

Adapun sidang beragenda pembacaan Replik dari tim hukum Aiman telah selesai digelar, sidang dilanjutkan pada Kamis, 22 Februari 2024 esok dengan agenda pembacaan Duplik dari Termohon atau Direskrim Poldam Metro Jaya menanggapi Replik dari tim hukum Aiman. ● mei

FOTO: ANT



SIDANG LANJUTAN ANDHI PRAMONO

Terdakwa kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Andhi Pramono (tengah) meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/2). Sidang mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tersebut beranggotakan mendengarkan keterangan dua orang saksi yaitu ahli hukum pidana dan perdata.

KPU Tetap Gunakan Sirekap Meski Ada Penolakan dari PDIP

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan, tetap menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap hasil Pemilu 2024, meskipun ada penolakan dari PDIP Perjuangan.

"Yang yang jelas Sirekap ada dalam peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023. Keberadaan Sirekap diatur dalam PKPU," kata Anggota KPU RI, Idham Holik, saat dikonfirmasi wartawan terkait penolakan Sirekap oleh PDIP, Rabu (21/2).

Idham menjelaskan bahwa salah satu dari 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU 7 Tahun 2017 itu adalah terbuka.

"Sirekap adalah teknologi yang digunakan untuk keterbukaan informasi mengenai hasil perolehan suara di TPS," ujarnya.

Kendati tetap menggunakan Sirekap, Idham memastikan KPU akan

tetap membahas surat penolakan yang dilayangkan PDIP. Surat tersebut telah diterima pada Selasa 20 Februari 2024 malam. "Terkait dengan surat tersebut, itu akan dibahas dalam tataran pimpinan di KPU," katanya.

Sebelumnya DPP PDIP Perjuangan menyatakan menolak penggunaan penghitungan suara dengan Sirekap KPU. Penolakan itu disebut dalam surat pernyataan DPP PDIP Perjuangan, Bambang Wuryanto dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kemudian surat tersebut dilayangkan kepada KPU RI, pada Selasa (20/2).

"PDIP Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno," demikian bunyi surat pernyataan tersebut. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



PEMBACAAN SUMPAH ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN

Anggota Komisi Kejaksaan mengikuti pembacaan sumpah saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2). Presiden Joko Widodo mengambil sumpah sembilan anggota Komisi Kejaksaan masa jabatan 2024-2028 yakni Pujiono Suwandi sebagai Ketua merangkap anggota, Babul Khoir sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan sebagai anggota yakni Muhammad Yusuf, Hefnir, Nurwinah, Dahlena, Rita Serena Kalibonso, Diah Srikanti, Nurokhman.

Politisi PDIP Bertanyakan Upaya Jokowi Ingin Bertemu Megawati dan Ketum Parpol Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud pertanyakan langkah Jokowi yang akan merangkul pimpinan parpol. Padahal pemenang Pilpres 2024 belum diputuskan.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, rencana pertemuan dengan para ketua umum (Ketum) partai politik (Parpol) Lainnya, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tengah diatur.

Jokowi kembali menegaskan bahwa ia ingin menjadi jembatan bagi seluruh pihak.

"Saya kira ini dalam proses diatur semuanya, karena

saya memang ingin menjadi jembatan semuanya," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/2).

Jokowi menegaskan bahwa dirinya membuka pintu pertemuan terhadap seluruh ketua umum partai politik yang ada.

"Semua yang kira-kira memang harus ketemu, bisa saja ketemu," katanya.

Jokowi pun tidak menentu dengan para tokoh-

dang semua ketua umum partai politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pasca pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Istana Kepresidenan pada Minggu (19/2).

"Semua diundang," kata Jokowi usai menghadiri Puncak Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/1).

Selain mengundang Ketua Umum PKB, Jokowi juga bakal mengundang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Semua diundang," kata Jokowi.

Jokowi mengaku hanya menjadi jembatan dalam pertemuan dengan para tokoh-

tokoh partai politik, khususnya saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Dikritik Adian Napitupulu Wakil Deputi Kinetik Teritorial Tim Pememenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu, mempertanyakan langkah Jokowi yang dinilai akan merangkul pimpinan partai politik. Padahal pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum diputuskan.

"Persoalannya siapa pemenang sesungguhnya? Pemenang sejati itu masih diragukan banyak orang. Dan keraguan itu tidak hanya datang dari imajinasi," kata Adian saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Adian mengatakan, keraguan itu datang dari angka rekapitulasi suara yang muncul dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU RI.

"Angkanya dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh negara, Melalui siapa? Melalui Sirekap. Sirekap punya siapa? KPU. KPU itu apa? Lembaga negara," ucap Adian.

Adian merasa, masih banyak rakyat yang bingung terhadap hasil perolehan suara sementara yang dikeluarkan oleh KPU RI. Di sisi lain, sambungnya, KPU RI tak bisa menjelaskan ada kejanggalaan selama proses Pilpres 2024 berlangsung.

"Sampai saat ini rakyat bingung karena produk yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah, angka menggelembung dan sebagainya," katanya.

"Terus kenapa kita mau bicara rangkul-merangkul? Pememenangan saja belum tahu," ujar mantan aktivis 98 ini. ● han

Bawaslu Rekomendasikan 1.496 TPS Laksanakan Pemungutan Suara Ulang

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan 1.496 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah Indonesia, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang, lanjutan dan susulan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty, merinci, seribu rekamendasi itu terbagi yakni 780 TPS pemungutan/penghitungan suara ulang (PSU). 132 rekomendasi pemungutan/penghitungan suara lanjutan (PSL) dan 584 rekomendasi pemungutan suara susulan (PSL).

"Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu, terpenuhi keadaan yang menjadi syarat PSU sebagaimana ketentuan Pasal 80 PKPU No. 25 Tahun 2023, dan pasal 109 dan 110 PKPU No. 25

Tahun 2023 terkait syarat PSL dan PSS," ucap Lolly, Rabu (21/2).

Rekomendasi PSU dilatarbelangi diakomodirinya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik, surat keterangan dan tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb hingga terdapat pemilih yang KTP-nya tidak sesuai dengan domisili.

Lalu terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih. Alasan terakhir dilakukan PSU yakni terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.

Alasan dilaksanakan PSL adalah kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan penyebab

PSS adalah terjadinya kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan sebaran wilayah, rekomendasi 780 PSU tersebar di 38 provinsi, rekomendasi 132 PSL tersebar di 14 provinsi, dan rekomendasi 584 PSS di sembilan provinsi.

Menurutnya, mayoritas dari TPS sudah mendapatkan jadwal untuk melakukan rangkaian rekomendasi ini.

"Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketepatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, dan ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS," tuturnya. ● mei

FOTO: ANT



KEPALA BNPB PANTAU PENANGANAN BANJIR DI DEMAK

Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Letjen TNI Suharyanto (ketiga kiri) berbincang dengan Bupati Demak Eisti'anah (kiri) dan anggota komisi VII DPR RI Abdul Wachid (kdua kiri) di sela kunjungan kerja penanganan banjir di tanggul Sungai Wulan yang jebol di Kecamatan Karanganyar, Kab. Demak, Jawa Tengah, Rabu (21/2). Kunjungan kerja tersebut guna memastikan masa tanggap darurat banjir di Kab. Demak yang diperpanjang hingga 4 Maret 2024 dapat ditangani secara komperhensif.

Sedikitnya, 71 Anggota KPPS Gugur, Apakah Negara Perlu Minta Maaf?

JAKARTA (IM) - Sedikitnya 71 anggota KPPS yang meninggal dunia setelah menjalankan tugas pada pemilu serentak pada 14 Februari 2024 yang lalu. Terkait musibah tersebut, perlukah Negara minta maaf kepada pihak keluarga korban?

Wakil Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu menyebut bahwa hingga saat ini negara belum menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada anggota keluarga para panita pesta demokrasi yang gugur tersebut.

"Salah ya salah, sampai hari ini apakah negara mengatakan minta maaf? Ya tidak, tapi sibuk berdalih mencari argumentasi, kok kayak begini mental kita bernegara," ujar Adian dalam acara dialogue spesial Indonesia bersuara bersama iNews TV, Selasa (20/2).

Adian menyebut bahwa nyawa seseorang tidak bisa dihitung berdasarkan jumlah, maka Negara punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada panita Pemilu yang gugur itu.

"Tidak bisa kemudian, ya karena 10 yang meninggal dibandingkan dengan yang hidup kita terima dong, yang salah sedikit, kita terima, ya ti-

dak bisa dong," sambungnya. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menyebut, sebanyak 71 orang petugas pemilu 2024 meninggal dunia. Hal itu disampaikan Hasyim dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (19/2).

Lebih rinci, Hasyim menjelaskan dari 71 orang itu, satu orang Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK). Selanjutnya empat orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan.

KPU juga mencatat, sebanyak 4.567 dilaporkan sakit, dengan rincian di tingkat Kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS Desa Kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang, untuk linmas yang sakit ada 364 orang.

Hasyim mengatakan, pihaknya telah menyediakan santunan sebesar Rp 36.000.000 dan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000. Besaran santunan telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) tahapan pemilihan umum dan tahapan pemilihan. ● han

PENGUMUMAN PENGAMBILIHAN PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT

PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 41, Unit A, Jalan Jendral Sudirman No. 86, Kelurahan Karet Tengin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan pengambilalihan kepemilikan saham Perseroan oleh KB Asset Management Co., Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Korea, dengan alamat di Lantai 41, 10 Three iFC, Kukje Financial-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07326, Korea Selatan. Dengan kepemilikan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase
KB Asset Management Co., Ltd.	70%
PTI Gading Danalestari	30%

Pengumuman ini dibuat sebagaimana telah diumumkan dalam suatu surat kabar yang diterbitkan secara nasional, yaitu Koran International Media tanggal 15 Desember 2023 ("Pengambilalihan").

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih
Jakarta, 22 Februari 2024
Direksi Perseroan